



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NANING NUGRAHINI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 484797

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.927.803.500</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m <sup>2</sup> /133 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.838.427.500		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m <sup>2</sup> /110 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 530.376.000		
3. Tanah Seluas 2000 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 32.200.000		
4. Tanah Seluas 1000 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 16.800.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m <sup>2</sup> /50 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>68.625.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 66.625.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>770.400.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.858.073</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.858.686.573</b>

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	2.000.000
Rp.	3.856.686.573

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.